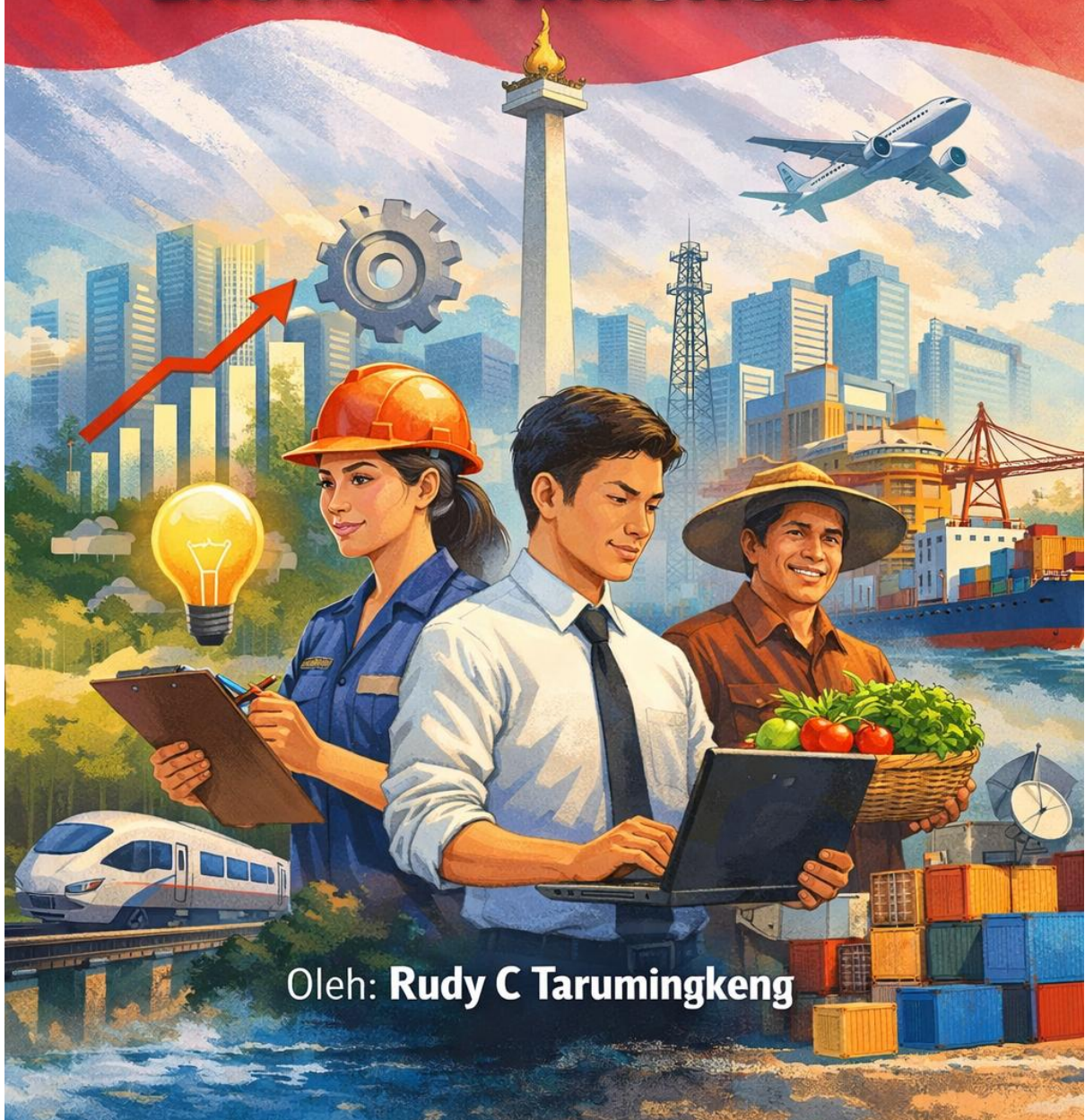


Produktivitas *sebagai* Kunci Kemajuan Ekonomi Indonesia



Oleh: **Rudy C Tarumingkeng**

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

4 Maret 2026

PRODUKTIVITAS SEBAGAI KUNCI KEMAJUAN EKONOMI INDONESIA

Pendahuluan

Dalam percakapan tentang kemajuan ekonomi Indonesia, istilah yang paling sering muncul biasanya adalah **pertumbuhan, investasi, lapangan kerja, hilirisasi**, atau **daya saing**. Namun, di balik semua istilah itu, ada satu kata yang sesungguhnya menjadi mesin penggerak utama: **produktivitas**. Produktivitas menentukan apakah pertumbuhan yang terjadi hanya bersifat sementara—ditopang harga komoditas, bonus demografi, atau belanja konsumsi—atau benar-benar menjadi jalan menuju kemakmuran yang lebih tinggi, lebih merata, dan lebih berkelanjutan. Lembaga-lembaga internasional yang menilai kinerja ekonomi Indonesia sama-sama menekankan hal ini. IMF pada Januari 2026 menyebut Indonesia tetap sebagai “bright spot” dengan pertumbuhan sekitar 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, tetapi juga menegaskan bahwa reformasi struktural yang lebih berani diperlukan untuk mendorong iklim usaha, pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta, dan produktivitas. OECD juga menilai konvergensi pendapatan Indonesia melambat karena pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menurun, sementara Bank Dunia berulang kali menekankan bahwa Indonesia masih menghadapi perlambatan pertumbuhan produktivitas dan memerlukan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya ke perusahaan dan sektor yang lebih produktif. (IMF)

Artinya, persoalan Indonesia hari ini bukan sekadar bagaimana membuat ekonomi “tetap tumbuh”, melainkan bagaimana membuat setiap tenaga

kerja, setiap jam kerja, setiap rupiah investasi, dan setiap unit sumber daya alam menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Negara bisa bertambah kaya bukan hanya karena memiliki lebih banyak orang yang bekerja, tetapi karena orang-orang itu bekerja dengan keterampilan lebih baik, teknologi lebih tepat, organisasi lebih efisien, infrastruktur lebih andal, dan institusi yang tidak memboroskan energi ekonomi. Dalam makna inilah produktivitas menjadi kata kunci. Ia bukan konsep teknokratis yang sempit, melainkan jantung dari pembangunan nasional. Ketika produktivitas meningkat, upah riil cenderung naik, harga bisa lebih stabil karena pasokan membaik, perusahaan menjadi lebih kompetitif, penerimaan negara membesar, dan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial pun ikut menguat. Sebaliknya, tanpa perbaikan produktivitas, pertumbuhan mudah terjebak di kisaran menengah, ketimpangan antarsektor melebar, dan cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 akan semakin berat. ([World Bank](#))

Produktivitas juga penting karena Indonesia sedang berada pada titik sejarah yang menentukan. Di satu sisi, negeri ini memiliki penduduk besar, pasar domestik luas, posisi strategis di Asia, kekayaan sumber daya alam, dan momentum transformasi digital yang nyata. Di sisi lain, ada tantangan yang tidak kecil: kualitas pembelajaran dasar yang masih lemah, investasi riset yang rendah, dominasi pekerjaan informal, produktivitas sektor jasa yang belum memadai, keterbatasan integrasi ke rantai nilai global, serta regulasi yang dalam beberapa kasus masih memperlambat dinamika usaha. Karena itu, membicarakan produktivitas berarti membicarakan masa depan Indonesia secara menyeluruh: kualitas manusia, kualitas institusi, arah industrialisasi, transformasi UMKM, digitalisasi, reformasi pasar kerja, sampai tata kelola negara. ([OECD](#))

Apa yang Dimaksud dengan Produktivitas?

Secara sederhana, produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output yang lebih besar dari input yang tersedia. Dalam ekonomi, produktivitas sering dibedakan menjadi dua. Pertama, **produktivitas tenaga kerja**, yaitu berapa banyak nilai tambah yang dihasilkan setiap pekerja atau setiap jam kerja. Kedua, **total factor productivity** atau produktivitas total faktor, yakni ukuran yang lebih dalam tentang seberapa efisien modal, tenaga kerja, teknologi, organisasi, dan manajemen digabungkan dalam proses produksi. Dua perusahaan dapat memiliki jumlah pekerja dan mesin yang sama, tetapi yang satu lebih produktif karena tata kelola, keterampilan, desain proses, kualitas data, dan akses pasarnya lebih baik. Itulah sebabnya produktivitas bukan hanya soal “kerja lebih keras”, melainkan terutama soal **kerja lebih cerdas dan lebih terorganisasi**. Bank Dunia dalam berbagai kajian Indonesia menekankan bahwa pertumbuhan di masa depan harus bertumpu pada kebijakan dan institusi yang menempatkan sumber daya pada perusahaan dan industri yang lebih produktif; OECD pun menghubungkan produktivitas dengan mutu lingkungan usaha, keterbukaan perdagangan, digitalisasi, dan kualitas sumber daya manusia. ([World Bank](#))

Dalam narasi publik, produktivitas sering disalahpahami seolah-olah identik dengan percepatan kerja individu. Padahal, seorang guru, petani, perawat, pegawai logistik, atau operator pabrik tidak bisa begitu saja “meningkatkan produktivitasnya” hanya dengan diminta bekerja lebih cepat. Seorang petani menjadi lebih produktif bila memiliki benih yang lebih baik, irigasi yang lebih pasti, akses pupuk yang tepat, data cuaca, pembiayaan yang masuk akal, dan jalur distribusi yang efisien. Pekerja pabrik menjadi lebih produktif bila mesin tidak sering berhenti, bahan baku datang tepat waktu, sistem mutu berjalan, dan supervisor memahami continuous improvement. Dosen dan mahasiswa menjadi lebih produktif bila kualitas pembelajaran, literasi digital, dan akses riset meningkat. Dengan kata lain, produktivitas selalu merupakan hasil dari

ekosistem. Karena itu, negara yang ingin naik kelas tidak cukup hanya menyuruh rakyatnya rajin; negara itu harus merancang lingkungan yang memungkinkan kecerdasan, disiplin, dan inovasi memberi hasil yang lebih besar. OECD menegaskan bahwa Indonesia memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas melalui perbaikan lingkungan usaha, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi kerja perempuan, dan pemanfaatan digitalisasi; IMF juga menekankan peran reformasi struktural untuk memperkuat produktivitas dan pertumbuhan yang kaya pekerjaan. ([OECD](#))

Potret Indonesia: Tumbuh, tetapi Belum Optimal

Kinerja ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir patut dihargai. Di tengah ketidakpastian global, volatilitas keuangan, ketegangan dagang, dan perlambatan di berbagai negara, Indonesia tetap relatif tangguh. IMF pada Januari 2026 menyebut pertumbuhan diperkirakan tetap sekitar 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, dengan inflasi yang tetap terkendali. Bank Dunia pada Desember 2025 juga menyatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen pada sembilan bulan pertama 2025 dan diproyeksikan bertahan di sekitar level itu pada 2026–2027. Dari sudut stabilitas makro, ini adalah capaian penting. Ia menunjukkan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia tidak rapuh. Namun, justru karena stabilitas makro sudah relatif terjaga, tantangan berikutnya menjadi lebih jelas: **bagaimana menaikkan kualitas pertumbuhan tersebut.** ([IMF](#))

Data pasar kerja memberi gambaran yang bercampur. BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 turun menjadi 4,85 persen dari 4,91 persen setahun sebelumnya, dan jumlah penganggur terbuka turun menjadi 7,46 juta orang. Proporsi pekerja formal juga naik, tetapi hanya tipis, dari 42,05 persen menjadi 42,20 persen. Tambahan pekerjaan dalam setahun terutama muncul di sektor pertanian, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan.

Pada saat yang sama, BPS mencatat proporsi pekerja penuh waktu 67,32 persen, pekerja paruh waktu 24,77 persen, dan setengah pengangguran 7,91 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa penciptaan kerja berlangsung, tetapi kualitas dan formalitas pekerjaan belum melonjak secara signifikan. Dengan kata lain, Indonesia tidak terutama kekurangan pekerjaan semata; Indonesia masih menghadapi persoalan **jenis pekerjaan** dan **nilai tambah pekerjaan**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Masalah itu tampak semakin jelas jika dilihat dari sisi pendidikan, keterampilan, inovasi, dan mutu tenaga kerja. OECD mencatat bahwa penduduk usia 25–64 tahun yang memiliki pendidikan tinggi di Indonesia baru sekitar 13,1 persen, jauh di bawah rata-rata OECD 41,0 persen. Belanja litbang domestik bruto hanya 0,3 persen dari PDB, sementara rata-rata OECD 2,9 persen. Skor PISA 2022 untuk Indonesia juga masih rendah: membaca 359, matematika 366, dan sains 383, tertinggal dari rerata OECD. Pada saat yang sama, tingkat partisipasi kerja perempuan 51,7 persen masih jauh di bawah laki-laki yang 79,4 persen. Semua ini memperlihatkan bahwa produktivitas Indonesia tertahan bukan hanya oleh mesin atau modal, tetapi juga oleh kualitas modal manusia, inovasi, dan pemanfaatan talenta yang belum maksimal. ([OECD](#))

Tambahan lagi, beberapa kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa perlambatan produktivitas Indonesia bukan terutama karena orang Indonesia “tidak bekerja”, melainkan karena terlalu banyak tenaga kerja dan usaha terkonsentrasi pada kegiatan bernilai tambah rendah. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia masih mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas seperti banyak negara emerging market lain, dan menekankan pentingnya kebijakan yang mengurangi hambatan persaingan serta menempatkan sumber daya pada perusahaan yang lebih produktif. OECD bahkan menyebut konvergensi pendapatan Indonesia melambat karena pertumbuhan produktivitas tenaga kerja

melambat. Jadi, pesan besarnya jelas: pertumbuhan 5 persen penting, tetapi tidak akan cukup menjadi transformasional bila produktivitas tertinggal. ([World Bank](#))

Mengapa Produktivitas Indonesia Masih Tertahan?

Hambatan pertama adalah **dominannya informalitas**. Dunia usaha dan pasar kerja Indonesia masih ditandai oleh banyak usaha mikro dan kecil yang berada di pinggiran sistem formal, dengan perlindungan tenaga kerja yang terbatas, pembiayaan yang sempit, pencatatan usaha yang lemah, dan adopsi teknologi yang rendah. Bank Dunia pada awal 2026 menekankan bahwa sebagian besar orang Indonesia masih bekerja tanpa perlindungan atas cuti, pengangguran, atau pensiun, dan sebagian besar perusahaan beroperasi di luar kerangka hukum resmi. ILO juga menilai bahwa informalitas di Asia Pasifik—termasuk Indonesia—tetap tinggi; dalam kawasan, dua dari tiga pekerja berada dalam pekerjaan informal pada 2023, dan cakupan perlindungan sosial masih terbatas. BPS sendiri menunjukkan bahwa proporsi pekerja formal nasional baru 42,20 persen pada Agustus 2025, yang berarti mayoritas tenaga kerja masih berada di ranah informal. Informalitas yang sangat besar membuat perusahaan sulit tumbuh, sulit mengakses kredit formal, sulit berinovasi, dan cenderung bertahan pada skala kecil dengan produktivitas rendah. ([World Bank](#))

Hambatan kedua adalah **kualitas pembelajaran dan mismatch keterampilan**. Produktivitas tidak dapat dilepaskan dari apa yang dipelajari anak di sekolah, apa yang dikuasai lulusan, dan sejauh mana dunia pendidikan tersambung dengan kebutuhan ekonomi modern. Bank Dunia telah memperingatkan bahwa learning losses dan masalah pembelajaran akan berdampak pada pendapatan masa depan siswa dan produktivitas masa depan Indonesia bila tidak segera diatasi. OECD menunjukkan bahwa skor PISA Indonesia masih rendah, sementara proporsi pendidikan tinggi masih relatif kecil. Dalam situasi seperti ini,

perusahaan akan menghadapi biaya pelatihan lebih besar, dan banyak lulusan akan memasuki pasar kerja tanpa keterampilan problem-solving, numerasi, literasi, atau digital yang memadai. Akibatnya, investasi baru tidak selalu otomatis mendorong lonjakan produktivitas karena basis keterampilannya belum setara dengan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks. ([World Bank](#))

Hambatan ketiga adalah **lemahnya inovasi dan riset**. Belanja litbang Indonesia yang hanya sekitar 0,3 persen dari PDB menunjukkan bahwa ekonomi masih terlalu sedikit berinvestasi pada penciptaan pengetahuan, penemuan proses, dan pengembangan produk baru. Negara dapat bertahan beberapa waktu dengan mengimpor teknologi, tetapi untuk naik kelas secara berkelanjutan diperlukan kemampuan adaptasi dan inovasi domestik. Rendahnya litbang berarti sedikit laboratorium yang benar-benar tersambung dengan industri, sedikit insentif bagi perusahaan untuk bereksperimen, dan sedikit ruang bagi universitas untuk menjadi mesin nilai tambah ekonomi. Dalam jangka panjang, situasi ini akan membuat produktivitas bergerak lambat, karena ekonomi hanya bertumpu pada ekspansi input, bukan pada lompatan efisiensi dan pengetahuan. ([OECD](#))

Hambatan keempat adalah **lingkungan usaha dan alokasi sumber daya yang belum efisien**. OECD menilai bahwa memperbaiki lingkungan usaha, menurunkan hambatan perdagangan dan investasi, menegakkan competitive neutrality, serta mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pasar akan meningkatkan produktivitas Indonesia. Bank Dunia juga menyebut bahwa reformasi sektor swasta selama satu dekade telah memperbaiki lingkungan usaha, tetapi belum ترجمahkan secara memadai menjadi keuntungan produktivitas; faktor-faktor seperti akses keuangan, korupsi, dan waktu yang dihabiskan untuk menghadapi regulasi pemerintah sangat memengaruhi produktivitas perusahaan. Dalam bahasa sederhana, ada banyak perusahaan yang tidak gagal, tetapi juga tidak berkembang; ada terlalu banyak energi

ekonomi yang habis untuk mengurus izin, ketidakpastian aturan, biaya transaksi, atau perlindungan pasar yang berlebihan. Situasi itu membuat perusahaan terbaik tidak selalu tumbuh paling cepat, sementara yang kurang efisien masih dapat bertahan. ([OECD](#))

Hambatan kelima adalah **rendahnya produktivitas sebagian sektor jasa dan lemahnya konektivitas digital**. Ini penting karena ekonomi modern tidak hanya ditentukan oleh manufaktur, tetapi juga oleh logistik, distribusi, kesehatan, pendidikan, keuangan, desain, software, dan berbagai jasa lain. Bank Dunia pada 2026 mencatat bahwa produktivitas tenaga kerja sektor jasa Indonesia sekitar US\$8,6 ribu per pekerja, di bawah rata-rata ekonomi sebesar US\$9,6 ribu; beberapa subsektor seperti hospitality lebih rendah lagi. OECD menambahkan bahwa pemanfaatan alat digital oleh banyak sektor usaha di Indonesia masih terbatas, padahal digitalisasi lintas sektor—termasuk pertanian—dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Bank Dunia juga menilai percepatan 5G kini krusial bagi daya saing dan produktivitas Indonesia, dan bahwa kenaikan adopsi broadband dapat menaikkan total factor productivity sekitar 3,5–5,8 persen dalam lima tahun. Jadi, masalah digital Indonesia bukan sekadar akses internet untuk konsumsi, tetapi akses digital untuk **produksi**. ([World Bank](#))

Produktivitas dan Transformasi Struktural

Kemajuan ekonomi jangka panjang hampir selalu terkait dengan **transformasi struktural**: perpindahan tenaga kerja dan modal dari aktivitas berproduktivitas rendah ke aktivitas berproduktivitas lebih tinggi. Dalam sejarah pembangunan, negara-negara yang berhasil naik kelas biasanya tidak hanya memperbesar ukuran ekonominya, tetapi juga mengubah komposisi ekonominya. Petani tidak semuanya tetap menjadi petani tradisional; sebagian masuk ke agroindustri, logistik, manufaktur, dan jasa modern. Pekerja informal tidak selamanya berada di usaha subsisten; sebagian beralih menjadi pekerja formal atau

wirausahawan yang lebih terhubung dengan pasar, pembiayaan, dan teknologi. Bank Dunia menekankan bahwa fondasi infrastruktur, tata kelola, dan manajemen makro telah membantu transformasi struktural Indonesia dari pertanian berproduktivitas rendah menuju manufaktur dan jasa yang produktivitasnya moderat. Namun, proses ini belum cukup dalam, dan banyak pekerjaan masih terkonsentrasi pada segmen bernilai tambah rendah. ([World Bank](#))

Di sinilah produktivitas menjadi kata penghubung antara sektor-sektor ekonomi. Dalam pertanian, produktivitas berarti bukan hanya menaikkan hasil panen, tetapi juga memperkuat penyimpanan dingin, grading, distribusi, pembiayaan, dan pengolahan pascapanen. Dalam manufaktur, produktivitas berarti memadukan mesin, kualitas tenaga kerja, standardisasi, energi, dan integrasi rantai pasok. Dalam jasa, produktivitas berarti memperbaiki logistik, digital payments, software, manajemen data, serta standar layanan profesional. Sektor-sektor ini saling terikat. Pabrik tidak akan efisien bila logistik buruk; pertanian tidak akan naik kelas bila jasa distribusi lemah; UMKM digital tidak akan tumbuh bila konektivitas mahal dan regulasi e-commerce memberatkan. Karena itu, strategi produktivitas nasional harus memandang ekonomi sebagai ekosistem yang saling menopang, bukan kumpulan silo sektoral. OECD secara eksplisit menyebut bahwa digitalisasi di seluruh sektor usaha, termasuk pertanian, akan membantu produktivitas; Bank Dunia menekankan bahwa jasa yang lebih kompetitif dapat membawa produktivitas lebih tinggi dan pekerjaan dengan upah lebih baik. ([OECD](#))

Transformasi struktural Indonesia juga harus dibaca dalam konteks hilirisasi dan industrialisasi. Hilirisasi dapat menjadi alat produktivitas bila ia menghasilkan pembelajaran teknologi, peningkatan keterampilan, keterhubungan dengan pemasok domestik, dan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi. Namun OECD memperingatkan bahwa kebijakan hilirisasi, misalnya pada nikel, perlu kehati-hatian karena ada risiko kapasitas pengolahan berlebih dan implikasi fiskal. Artinya, hilirisasi yang

produktif bukan sekadar menambah pabrik peleburan, tetapi menciptakan ekosistem industri yang lebih canggih: rekayasa, material maju, manufaktur turunan, jasa teknik, riset universitas-industri, dan tenaga kerja yang terus meningkat kompetensinya. Produktivitas akan naik bukan karena bahan mentah “ditahan di dalam negeri” semata, melainkan karena proses pengolahan itu mendorong lompatan pengetahuan dan efisiensi. ([OECD](#))

Modal Manusia: Fondasi Produktivitas yang Sesungguhnya

Dalam banyak negara, diskusi produktivitas sering jatuh ke dalam obsesinya pada mesin, modal, dan investasi fisik. Padahal, di belakang semua itu, ada manusia. Indonesia tidak akan menjadi ekonomi berproduktivitas tinggi jika anak-anaknya tidak membaca dengan baik, jika lulusan sekolah menengah tidak kuat di numerasi, jika perguruan tinggi tidak melatih pemecahan masalah, dan jika pelatihan kerja tidak terhubung dengan industri. OECD memperlihatkan bahwa hasil belajar Indonesia masih tertinggal, dan Bank Dunia telah menekankan bahwa gangguan pembelajaran pada masa pandemi berpotensi menekan produktivitas masa depan bila tidak ditangani dengan serius. ADB pada 2025 juga menegaskan bahwa pembangunan modal manusia memerlukan investasi terkoordinasi pada pendidikan, keterampilan, aktivasi pasar kerja, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk mendorong produktivitas. ([OECD](#))

Dalam konteks Indonesia, pembangunan modal manusia seharusnya dipahami sebagai rantai panjang, bukan program sektoral terpisah. Ia dimulai dari gizi dan kesehatan ibu-anak, berlanjut ke pendidikan dasar yang benar-benar menguasai literasi dan numerasi, lalu ke pendidikan menengah yang relevan, pendidikan vokasi yang adaptif, perguruan tinggi yang kolaboratif dengan industri, dan skema reskilling-upskilling sepanjang hayat. Bila salah satu mata rantai ini lemah, produktivitas nasional akan menanggung akibatnya. Inilah sebabnya mengapa kualitas

manusia harus dipandang sebagai strategi ekonomi, bukan hanya agenda sosial. Negara yang berhasil membangun manusia yang sehat, terdidik, disiplin, dan adaptif biasanya juga berhasil membangun perusahaan yang lebih kuat, kota yang lebih inovatif, dan birokrasi yang lebih efektif. ([Asian Development Bank](#))

Ada aspek lain yang sangat penting, yaitu **pemanfaatan talenta perempuan**. OECD mencatat partisipasi kerja perempuan Indonesia sekitar 51,7 persen, jauh di bawah laki-laki 79,4 persen. Ini bukan sekadar isu kesetaraan; ini juga isu produktivitas nasional. Ketika jutaan perempuan berpendidikan tidak dapat masuk atau bertahan dalam dunia kerja karena kurangnya dukungan pengasuhan, norma sosial, transportasi yang tidak aman, atau desain kerja yang kaku, negara sesungguhnya sedang menyalakan cadangan produktivitas yang besar. Meningkatkan produktivitas Indonesia berarti juga membuka ruang lebih luas bagi partisipasi kerja perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kewirausahaan perempuan. Dengan demikian, produktivitas bukan hanya persoalan mesin dan pabrik, tetapi juga soal apakah sebuah bangsa menggunakan seluruh kapasitas manusianya secara optimal. ([OECD](#))

Digitalisasi, Inovasi, dan Produktivitas Baru

Tidak ada pembicaraan serius tentang produktivitas masa depan tanpa digitalisasi. Namun digitalisasi yang relevan bagi produktivitas bukanlah sekadar pertumbuhan konsumsi media sosial atau transaksi online, melainkan penetrasi digital ke dalam proses kerja: pencatatan inventori, manajemen pelanggan, analitik produksi, sistem pembayaran, marketplace B2B, logistik cerdas, telemedicine, precision agriculture, sampai otomatisasi administrasi publik. OECD menilai bahwa banyak bagian ekonomi Indonesia masih menggunakan alat digital secara terbatas, dan bahwa digitalisasi sektor usaha, termasuk pertanian dan UMKM, perlu dipromosikan lebih kuat. Bank Dunia pada Desember 2025

bahkan memberi judul laporan prospek ekonominya “Digital Foundations for Growth”, menandakan bahwa fondasi digital kini dipandang sebagai salah satu penentu utama pertumbuhan masa depan. (OECD)

Signifikansi digitalisasi bagi produktivitas bukan sekadar teori. Bank Dunia melaporkan bahwa percepatan implementasi 5G kini penting bagi daya saing dan produktivitas Indonesia, dan bahwa peningkatan adopsi broadband dapat menaikkan total factor productivity sekitar 3,5–5,8 persen dalam lima tahun. Ini angka yang besar. Ia menunjukkan bahwa konektivitas bukan hanya infrastruktur komunikasi, tetapi infrastruktur efisiensi ekonomi. Dengan broadband yang lebih luas dan andal, UMKM dapat menjangkau pasar lebih besar, perusahaan menengah dapat mengatur rantai pasok lebih presisi, pekerja dapat mengakses pelatihan digital, dan pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat. Tanpa fondasi digital yang kuat, banyak inisiatif produktivitas akan bergerak setengah hati. (World Bank)

Namun digitalisasi sendiri tidak otomatis menaikkan produktivitas. Banyak perusahaan kecil membeli perangkat lunak atau membuka akun marketplace, tetapi tidak mengubah proses bisnisnya. Karena itu, Indonesia membutuhkan **kapabilitas transformasi digital**, bukan sekadar perangkat digital. Di sinilah pentingnya manajemen perubahan, pelatihan operator, literasi data, kepemimpinan digital, dan desain proses. Dalam bahasa manajemen, produktivitas naik ketika teknologi bertemu dengan **people, process, dan purpose**. Bila tidak, teknologi hanya menjadi hiasan modern yang mahal. OECD mengingatkan bahwa regulasi yang membebani perusahaan digital—misalnya pembatasan tertentu pada aktivitas e-commerce—dapat menghambat pertumbuhan produktivitas. Jadi, digitalisasi produktif memerlukan kombinasi infrastruktur, kompetensi, dan regulasi yang cerdas. (OECD)

Produktivitas UMKM, Formalisasi, dan Kenaikan Kelas Usaha

Karena struktur usaha Indonesia sangat didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, maka cerita produktivitas Indonesia pada dasarnya juga adalah cerita produktivitas UMKM. Banyak UMKM lahir dari ketahanan sosial, kreativitas keluarga, dan kebutuhan bertahan hidup. Mereka menyerap tenaga kerja, menjaga denyut ekonomi lokal, dan menjadi penyangga sosial saat krisis. Tetapi bila sebagian besar UMKM tetap berada pada skala subsisten, tanpa pencatatan keuangan yang baik, tanpa akses pembiayaan murah, tanpa mesin yang memadai, dan tanpa akses pasar yang luas, maka perekonomian nasional akan sulit melonjak produktivitasnya. Bank Dunia menekankan bahwa usaha mikro dan kecil menyumbang sebagian besar pekerjaan tetapi sering kali dalam produktivitas yang rendah. Tantangannya bukan mengurangi UMKM, melainkan membantu mereka **naik kelas**. ([World Bank](#))

Naik kelas UMKM berarti beberapa hal sekaligus. Pertama, formalisasi yang memudahkan, bukan menghukum. Usaha kecil perlu merasa bahwa menjadi formal memberi manfaat nyata: akses kredit, perlindungan hukum, peluang pengadaan, sertifikasi, dan pasar yang lebih luas. Kedua, akses teknologi yang praktis, bukan jargonistik. Banyak UMKM tidak memerlukan AI yang rumit; mereka memerlukan POS sederhana, pencatatan stok, pembukuan digital, dan koneksi ke pemasok. Ketiga, koneksi ke ekosistem yang lebih besar: koperasi modern, aggregator, industri pengolahan, platform logistik, dan lembaga pelatihan. Keempat, pembiayaan yang memahami aset tak berwujud dan arus kas usaha kecil. OECD menilai bahwa perusahaan digital sering sulit memperoleh pembiayaan karena aset tak berwujud mereka tidak diterima sebagai kolateral; Bank Dunia juga menunjukkan bahwa akses keuangan merupakan salah satu faktor yang paling memengaruhi produktivitas perusahaan. ([OECD](#))

Di sini menarik untuk membayangkan sebuah contoh naratif. Bayangkan seorang pelaku UMKM makanan olahan di Bogor. Pada tahap awal, ia memproduksi secara manual, menjual melalui lingkaran kenalan, dan

mencatat transaksi di buku kecil. Pendapatannya cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk ekspansi. Lalu ia mengikuti program pelatihan sederhana: belajar standardisasi resep, pencatatan digital, strategi pemasaran, pengemasan, dan akses marketplace. Setelah itu, ia masuk ke skema pembiayaan mikro formal, membeli alat pengemasan yang lebih baik, bergabung dengan jaringan distribusi yang dapat menjaga kualitas, dan memperoleh sertifikasi yang membuka akses ke pasar modern. Dalam dua atau tiga tahun, jumlah pekerjanya bertambah, limbah turun, kualitas stabil, dan pasar meluas. Inilah produktivitas dalam bentuk paling konkret: output yang lebih besar, kualitas yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, dan kerja yang lebih bermartabat. Esensinya bukan semata besarnya modal, tetapi sinergi antara formalitas, pengetahuan, teknologi, dan akses pasar. Kerangka seperti ini sangat sejalan dengan temuan Bank Dunia, OECD, dan ADB tentang pentingnya iklim usaha, digitalisasi, pembiayaan, dan modal manusia bagi produktivitas Indonesia. ([World Bank](#))

Dimensi Wilayah: Produktivitas Tidak Seragam di Seluruh Indonesia

Produktivitas juga memiliki dimensi spasial. Indonesia adalah negara kepulauan besar dengan disparitas wilayah yang nyata. Peluang kerja, infrastruktur, kualitas pendidikan, akses internet, dan kedekatan ke pasar modern berbeda-beda antardaerah. Karena itu, kebijakan produktivitas nasional tidak boleh hanya berpusat pada Jakarta atau kawasan industri utama di Jawa. Bank Dunia pada 2025 mencatat bahwa pekerja di wilayah perkotaan Indonesia rata-rata memperoleh pendapatan 40–50 persen lebih tinggi dibanding pekerja yang sebanding di wilayah perdesaan, mencerminkan produktivitas dan aglomerasi ekonomi yang lebih tinggi di kota. Data ini penting: ia menunjukkan bahwa lokasi memengaruhi peluang produktivitas. ([The World Bank](#))

Namun urbanisasi bukan obat otomatis. Kota yang macet, mahal, penuh ketidakpastian lahan, dan minim transportasi publik justru dapat

menurunkan produktivitas. Yang dibutuhkan adalah urbanisasi yang produktif: perumahan terjangkau dekat pusat kerja, transportasi efisien, layanan digital, kawasan industri dan logistik yang terhubung, serta universitas yang menjadi simpul inovasi lokal. Dalam konteks Indonesia, kota-kota menengah dan kawasan pertumbuhan baru dapat menjadi laboratorium produktivitas bila didukung dengan infrastruktur fisik dan digital yang memadai. Bank Dunia menekankan bahwa fondasi infrastruktur fisik dan manusia yang baik, ditopang tata kelola yang kuat, merupakan syarat bagi pertumbuhan yang lebih cepat dan pekerjaan yang lebih baik. ([World Bank](#))

Produktivitas wilayah juga berkaitan dengan cara kita memandang sektor primer. Daerah yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, atau tambang tidak harus identik dengan produktivitas rendah. Yang menentukan adalah apakah daerah tersebut hanya mengekspor bahan mentah, atau berhasil membangun ekosistem nilai tambah: pengolahan, logistik rantai dingin, standardisasi mutu, desain produk, platform perdagangan, riset varietas, sampai wisata berbasis kekhasan lokal. Dengan demikian, agenda produktivitas daerah sesungguhnya adalah agenda **transformasi aset lokal menjadi nilai tambah berkelanjutan**. Bagi Indonesia, ini sangat relevan karena kekuatan nasional justru terletak pada keragaman geografis dan sumber daya daerah. ([The World Bank](#))

Peran Negara: Bukan Menggantikan Pasar, tetapi Membuat Pasar Bekerja Lebih Produktif

Dalam perdebatan pembangunan, sering muncul oposisi semu antara negara dan pasar. Seolah-olah produktivitas hanya dapat lahir dari mekanisme pasar murni, atau sebaliknya hanya dari intervensi negara yang kuat. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa pertanyaannya bukan negara *atau* pasar, melainkan **negara seperti apa yang membuat pasar bekerja lebih produktif**. IMF, OECD, dan Bank

Dunia pada dasarnya berbicara dalam arah yang sama: Indonesia memerlukan kebijakan makro yang kredibel, infrastruktur yang memadai, peningkatan mutu manusia, serta reformasi struktural yang memperkuat iklim usaha dan persaingan. Negara berperan menyediakan aturan main yang jelas, mencegah rente, membangun infrastruktur, memperbaiki kualitas pendidikan, dan menyiapkan jaring pengaman transisi; sedangkan perusahaan dan pekerja mengubah semua itu menjadi inovasi, efisiensi, dan nilai tambah. ([IMF](#))

Karena itu, agenda produktivitas menuntut birokrasi yang tidak sekadar hadir, tetapi **efektif**. Perizinan yang lebih sederhana, konsistensi kebijakan pusat-daerah, sistem data yang interoperabel, pengadaan yang transparan, dan regulasi yang prediktif bukan isu administratif kecil; semuanya adalah variabel produktivitas. Ketika perusahaan harus menghabiskan terlalu banyak waktu untuk urusan kepatuhan yang tumpang tindih, produktivitas nasional sedang terkuras. Ketika pelaku usaha tidak yakin aturan ekspor-impor atau investasi akan tetap stabil, keputusan ekspansi menjadi tertunda. Bank Dunia menegaskan bahwa waktu yang dihabiskan berurusan dengan regulasi pemerintah, akses keuangan, dan korupsi merupakan faktor penting yang memengaruhi produktivitas perusahaan di Indonesia. OECD juga menyebut bahwa pengurangan hambatan non-tarif dan perbaikan tata kelola BUMN akan membantu produktivitas. ([World Bank](#))

Peran negara juga penting dalam mendesain **transisi yang adil**. Kenaikan produktivitas kadang berarti otomatisasi, relokasi, atau hilangnya sebagian jenis pekerjaan. Bila negara tidak menyediakan reskilling, dukungan mobilitas tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang memadai, maka resistensi terhadap reformasi akan besar. Itulah mengapa ADB menautkan produktivitas dengan pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial; dan ILO menyoroti pentingnya formalisasi serta perluasan perlindungan. Negara yang baik bukan negara yang menghambat perubahan demi status quo, melainkan

negara yang membantu warga dan perusahaan menyeberangi perubahan itu tanpa terjatuh. ([Asian Development Bank](#))

Agenda Besar: Dari Produktivitas sebagai Slogan ke Produktivitas sebagai Strategi Nasional

Apabila Indonesia ingin menjadikan produktivitas sebagai kunci kemajuan ekonomi, maka diperlukan strategi nasional yang terintegrasi. Pertama, **revolusi kualitas belajar**. Fokusnya bukan semata belanja lebih besar, tetapi hasil belajar yang lebih nyata: literasi, numerasi, sains, problem-solving, dan literasi digital. Karena kualitas manusia adalah mesin produktivitas jangka panjang, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya diukur dari angka partisipasi, tetapi dari kompetensi nyata lulusan. OECD, Bank Dunia, dan ADB memberi dasar yang kuat untuk kesimpulan ini. ([OECD](#))

Kedua, **formalisasi dan kenaikan kelas UMKM**. Formalisasi harus dibuat ringan, murah, dan bernilai; pajak, pembiayaan, sertifikasi, dan pengadaan harus dirancang sebagai insentif produktivitas, bukan sekadar alat penertiban. Ketiga, **reformasi kompetisi, investasi, dan perdagangan**. Indonesia perlu memastikan bahwa perusahaan yang efisien dapat tumbuh, investor mendapat kepastian, dan integrasi ke rantai nilai global semakin kuat. OECD secara jelas mendorong penurunan hambatan perdagangan dan investasi serta penegakan persaingan yang lebih sehat; IMF menilai langkah semacam ini penting bagi produktivitas dan pertumbuhan yang dipimpin sektor swasta. ([OECD](#))

Keempat, **lompatan digital produktif**. Bukan hanya infrastruktur broadband dan 5G, tetapi juga digitalisasi proses bisnis UMKM, sekolah, rumah sakit, logistik, pertanian, dan layanan publik. Kelima, **penguatan ekosistem inovasi**: insentif litbang, kemitraan universitas-industri, pusat desain dan prototipe, serta pembiayaan untuk inovasi. Keenam, **produktifkan kota dan wilayah** melalui perumahan, transportasi,

kawasan industri-logistik, dan konektivitas antardaerah. Ketujuh, **aktifkan talenta perempuan dan generasi muda** sebagai sumber daya produktivitas yang masih kurang dimanfaatkan. Kedelapan, **bangun birokrasi yang memfasilitasi**, bukan menyulitkan. Tanpa agenda terintegrasi seperti ini, produktivitas akan tetap menjadi slogan di dokumen, bukan kenyataan di pabrik, sawah, kantor, kampus, dan pasar.

([World Bank](#))

Penutup

Pada akhirnya, produktivitas adalah cara bangsa mengubah potensi menjadi kenyataan. Indonesia memiliki hampir semua bahan dasar untuk maju: demografi besar, posisi geopolitik strategis, kekayaan sumber daya, pasar domestik yang luas, dan semakin banyak energi kewirausahaan. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa potensi tidak pernah cukup. Yang menentukan adalah kemampuan mengorganisasikan potensi itu menjadi **nilai tambah**. Di sinilah produktivitas menjadi kata kunci. Ia menjembatani pertumbuhan dengan kesejahteraan, investasi dengan upah, teknologi dengan manusia, serta stabilitas makro dengan kemajuan riil di tingkat rumah tangga. IMF, OECD, Bank Dunia, ADB, BPS, dan ILO—dengan bahasa yang berbeda—semuanya menunjuk ke arah yang sama: Indonesia telah tangguh, tetapi untuk benar-benar naik kelas, produktivitas harus menjadi pusat strategi pembangunan. ([IMF](#))

Maka, “Produktivitas sebagai Kunci Kemajuan Ekonomi Indonesia” bukan sekadar judul yang baik untuk makalah, melainkan tesis pembangunan yang sangat serius. Bila produktivitas naik, pertumbuhan tidak hanya bertahan tetapi membaik mutunya; pekerjaan tidak hanya bertambah tetapi juga lebih layak; UMKM tidak hanya bertahan tetapi naik kelas; sumber daya alam tidak hanya diekspor tetapi diolah menjadi pengetahuan dan nilai tambah; dan negara tidak hanya kuat secara statistik, tetapi juga semakin adil dalam distribusi peluangnya.

Sebaliknya, bila produktivitas diabaikan, Indonesia berisiko puas dengan

pertumbuhan yang cukup, tetapi tidak cukup transformatif. Karena itu, agenda produktivitas sesungguhnya adalah agenda peradaban ekonomi: membangun Indonesia yang bukan hanya lebih besar, melainkan lebih cerdas, lebih efisien, lebih inklusif, dan lebih bermartabat. ([World Bank](#))

Berikut **glosarium** dan **referensi** yang dapat menyertai esai "*Produktivitas sebagai Kunci Kemajuan Ekonomi Indonesia.*"

Glosarium

Produktivitas: kemampuan suatu perekonomian, sektor, perusahaan, atau pekerja untuk menghasilkan output yang lebih besar dari input yang digunakan. Dalam konteks pembangunan, produktivitas menentukan seberapa efisien tenaga kerja, modal, teknologi, dan organisasi diubah menjadi nilai tambah. ([World Bank](#))

Produktivitas tenaga kerja: ukuran output atau nilai tambah yang dihasilkan per pekerja atau per jam kerja. Indikator ini sering dipakai untuk membandingkan efisiensi antar-sektor atau antar-negara. ([World Bank](#))

Total Factor Productivity (TFP): ukuran efisiensi gabungan dari berbagai faktor produksi—terutama tenaga kerja dan modal. TFP meningkat ketika teknologi, manajemen, inovasi, organisasi kerja, dan kualitas institusi membuat input yang sama menghasilkan output lebih besar. ([World Bank](#))

Nilai tambah: selisih antara nilai output yang dihasilkan dengan nilai input antara yang digunakan dalam proses produksi. Semakin tinggi nilai tambah, semakin besar kontribusi kegiatan ekonomi terhadap pendapatan nasional. ([World Bank](#))

Transformasi struktural: pergeseran tenaga kerja dan modal dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor berproduktivitas lebih tinggi, misalnya dari pertanian subsisten ke manufaktur modern atau jasa modern. Proses ini merupakan ciri penting pembangunan ekonomi jangka panjang.

([Open Knowledge World Bank](#))

Informalitas / sektor informal: bagian dari kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang belum sepenuhnya berada dalam kerangka hukum, perpajakan, perlindungan sosial, dan regulasi formal. Tingginya informalitas biasanya berkaitan dengan produktivitas yang lebih rendah dan perlindungan pekerja yang terbatas. ([International Labour](#)

[Organization](#))

Formalisasi usaha: proses membawa usaha atau pekerjaan ke dalam sistem resmi melalui perizinan, pencatatan, kepatuhan hukum, akses pembiayaan formal, dan perlindungan sosial. Formalisasi penting untuk menaikkan skala usaha dan produktivitas. ([World Bank](#))

Modal manusia (human capital): kumpulan pengetahuan, keterampilan, kesehatan, disiplin, dan kapasitas adaptasi yang dimiliki penduduk. Modal manusia yang kuat merupakan fondasi utama produktivitas jangka panjang. ([Asian Development Bank](#))

Mismatch keterampilan: ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan atau pekerja dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Mismatch dapat menghambat adopsi teknologi dan menurunkan produktivitas. ([World Bank](#))

Daya saing: kemampuan perusahaan, sektor, atau negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar sambil meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Produktivitas adalah inti dari daya saing yang berkelanjutan. ([OECD](#))

Digitalisasi produktif: penggunaan teknologi digital bukan hanya untuk komunikasi atau konsumsi, tetapi untuk meningkatkan efisiensi proses

bisnis, logistik, pemasaran, manajemen data, dan kualitas layanan.

([World Bank](#))

Broadband adoption: tingkat penggunaan koneksi internet pita lebar oleh rumah tangga, bisnis, atau institusi. Kenaikan adopsi broadband dapat memperkuat efisiensi, konektivitas pasar, dan produktivitas total faktor. ([World Bank](#))

Hilirisasi: strategi memperpanjang rantai nilai di dalam negeri melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk antara atau produk jadi bernilai tambah lebih tinggi. Hilirisasi berdampak pada produktivitas bila dibarengi pembelajaran teknologi, keterampilan, dan integrasi industri.

([OECD](#))

UMKM naik kelas: proses ketika usaha mikro, kecil, dan menengah berkembang dari skala subsisten menjadi usaha yang lebih formal, efisien, terdigitalisasi, dan terhubung dengan pasar lebih luas. ([World Bank](#))

Bonus demografi: periode ketika proporsi penduduk usia kerja relatif lebih besar dibanding penduduk nonproduktif. Bonus ini hanya menjadi keuntungan ekonomi jika didukung pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang produktif. ([World Bank](#))

Partisipasi angkatan kerja perempuan: persentase perempuan usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja. Peningkatan partisipasi ini sering dipandang sebagai sumber tambahan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang. ([OECD](#))

Referensi

Asian Development Bank. (2025, 10 Desember). *ADB Further Strengthens Indonesia's Human Capital to Boost Productivity*. Asian Development Bank. ([Asian Development Bank](#))

Asian Development Bank. (2025). *Boosting Productivity Through Human Capital Development Program* (project documents / report and recommendation). Asian Development Bank. ([Asian Development Bank](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 November). *Siaran Pers Badan Pusat Statistik: Struktur ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025*. BPS. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

International Monetary Fund. (2026, 21 Januari). *IMF Executive Board Concludes 2025 Article IV Consultation with Indonesia*. IMF. ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release, Staff Report, and Statement by the Executive Director for Indonesia*. IMF. ([IMF](#))

International Labour Organization. (2024). *Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2024*. ILO. ([International Labour Organization](#))

OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2024*. OECD Publishing. ([OECD](#))

OECD. (2024). *Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024* (versi ringkas bahasa Indonesia). OECD. ([OECD](#))

World Bank. (2025, Desember). *Indonesia Economic Prospects: Digital Foundations for Growth*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Services Competitiveness for Growth and Jobs in Indonesia*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2024/2025). *Unleashing Indonesia's Business Potential*.
World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2026). *Indonesia* (country economic/update report with
structural transformation and productivity discussion). World Bank.
([World Bank](#))

World Bank. (2025). *Funding Indonesia's Vision 2045* (Indonesia
Economic Prospects edition). World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2021/2024 access edition). *At Your Service? The Promise of
Services-Led Development*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 4 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a77cb3-4224-839e-9326-8adaae34c9c3>